

**FENOMENA KONFLIK ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT DUSUN
SOREANG DENGNA DUSUN LEMPONG KECAMATAN
MAPPAKASUNGGUH KABUPATEN TAKALAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

**MISWAR S.
10538 2586 13**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Miswar, S, NIM 1 10538258613 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

21 Jumadil Awal 1439 H
Makassar,
07 Februari 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.

3. Dr. Eliza Meiyani, M.Si.

4. Siti Asnaeni AM, S.Sos., M.Pd.

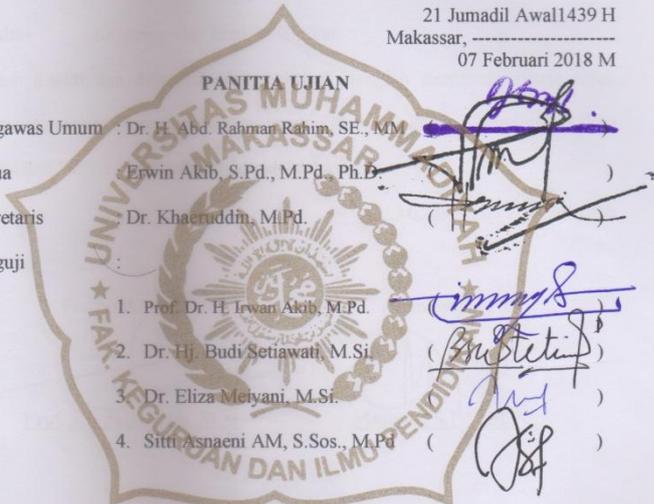
Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 234

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomena Konflik Masyarakat Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar.

Nama : Miswar S
NIM : 10538258613
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Februari 2018

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.


Muhajir, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

ABSTRAK

Miswar s. NIM. 10538 2586 13. Fenomena Konflik Antar Kelompok Masyarakat Dusun Soreang Dengan Dusun Lempong. Dibawah bimbingan **Prof. Dr. Jasruddin. M. Si. Dan Muhajir. S. Pd. M. Pd.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Posisi dan Peran Pemerintah Kecamatan Mappakasungguh Bekerja sama dengan pemerintah Dusun Soreang dengan Dusun Lempong dalam mengatasi Konflik antar Kelompok di Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Tkalar.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kecamatan Mappakasungguh dan Pemerintah Dusun Soreang dengan Dusun Lempong sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik antar kelompok pemuda tersebut sedikit demi sedikit.

Dari penelitian tersebut didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam menangani masalah konflik antar kelompok pemuda tersebut

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon pertolongan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT pemilik kehidupan. Penulis skripsi ini bukti betapa Maha Cinta-Nya Engkau Ya Allah. Terimakasih atas segala kesehatan dan kesempatan yang Engkau anugerahkan dalam hidupku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul ***“Fenomena Konflik Antar Kelompok Masyarakat Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Keamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar”*** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan pendidikan sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hal yang tidak dapat diharapkan bahwa dalam penulisan skripsi ini diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak turut membantu terhadap proses penyusunan didalamnya.

Bapak Dr. Abd Rahman Rahim, SE, M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Erwin Akib, S.Pd., P.hd selaku dekan FKIP, Bapak Dr.H. Nursalam, M.Si, selaku ketua jurusan program studi pendidikan sosiologi, dan Bapak Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris jurusan program studi pendidikan sosiologi. Segenap dosen jurusan sosiologi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis sejak pertama menjadi mahasiswa.

Sahabat – sahabat seperjuangan di Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP UNISMUH Makassar terkhusus angkatan 2013. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini yang penuh keeriaan dan saling membantu.

Buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu- persatu terima kasih atas bantuannya. Kiranya Allah SWT, yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada kami.

Dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun masih penulis harapkan guna kesempurnaan pada penulis selanjutnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Makassar, oktober 2017

Miswar s.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERJANJIAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Pustaka	7
1. Penelitian yang relevan.....	7
2. Masyarakat dan kelompok sosial.....	11
3. Dinamika kelompok sosial.....	12
4. Peranan.....	17
5. Konflik.....	21
B. Landasan Teori	24
1. Teori Peranan.....	24
2. Teori konflik.....	26
3. Teori resolusi konflik.....	30
C. kerangka Pikir	33
BAB III : METODE PENELITIAN	13
A. Jenis penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38

C.	Informan Penelitian	38
D.	Fokus Penelitian	39
E.	instrument Penelitian.....	40
F.	jenis Dan Suber Data	41
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
H.	Teknik Analisis Data.....	44
I.	Teknik Keabsahan Data.....	45
BAB IV	GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN.....	46
A.	Gambaran Umum Desa Soreang sebagai Daerah Penelitian.....	46
B.	Gambaran Umum Desa Soreang Sebagai Latar Penelitian.....	46
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A.	Deskripsi Informan Penelitian.....	55
B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
BAB VI		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat di selesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan hidup bangsa akan mengalami pemunduran apabila generasi muda yang berkonflik dibiarkan berlanjut. Maka hal itu bertentangan dengan asumsi yang biasa dikatakan oleh para generasi sebelumnya bahwa pemuda adalah pelopor perubahan dan sebagai generasi penerus yang akan memegang peranan yang urgen dalam setiap kehidupan masyarakat. Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka

berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher, et.al., 2001).

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Takalar, konflik antar kelompok sering kali terjadi dimana-mana. Konflik horizontal yang sering terjadi di Kabupaten Takalar umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Sebut saja daerah yang sering terlibat konflik diantaranya Dusun Soreang dan Dusun Lmpong yang ada di Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar..

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar pemuda yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Konflik antar kelompok yang terjadi di Dusun Soreang dan Dusun Lempng ini sangat begitu memprihatinkan, karena konflik ini sudah begitu lama, akan tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini. Terbukti perkelahian antar pemuda desa tersebut sering kali terjadi.

Seharusnya pemerintah setempat lebih serius dalam menangani kasus tersebut. Masalahnya setiap konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan banyak kerugian.

Peran pemerintah dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap peranan pemerintah terhadap Konflik yang terjadi antara Dusun Lempong dan Dusun Soreang. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Fenomena Konflik Antar kelompok di Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan diatas, rumusan masalah pada pokok penelitian adalah :

1. Bagaimana bentuk konflik kelompok di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar.?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pemicu terjadinya konflik kelompok di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar.?
3. Bagaimana resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik kelompok di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong di Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk konflik kelompok di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar kelompok Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan Mappakasungguh bekerja sama dengan pemerintah Desa yang berkonflik dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam bentuk perkelahian antar kelompok. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok pemuda tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini kekerasan yang berujung konflik.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik dalam bentuk perkelahian antar kelompok pemuda yang kerap terjadi. Terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan Mappakasungguh beserta pemerintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik antar kelompok pemuda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Yang Relevan

- a. Ruslan (2004). Dengan judul: Nilai perilaku dan motivasi nelayan tradisional Siantan (studi kasus konflik nelayan Siantan dengan awak kapal Thailand). Penelitian ini berangkat dari persoalan yang terjadi pada masyarakat nelayan Siantan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak tahun 1988 sampai tahun 2003 mengalami ketegangan dengan kapal-kapal nelayan Thailand yang masuk di wilayah perairan mereka. Ketegangan-ketegangan tersebut akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan, Sebagaimana diketahui bahwa daerah ini terdapat banyak pulau dan teluk serta berdekatan dengan laut Cina Selatan yang merupakan salah satu laut terdalam di dunia. Konflik berkepanjangan ini menimbulkan implikasi kekerasan yang dilakukan nelayan tradisional Siantan terhadap kapal Thailand. Dengan berbagai aksi, baik itu dalam bentuk pembakaran kapal, penutupan kantor-kantor kapal Thailand, aksi-aksi unjuk rasa pada pemerintahan sipil dan militer (angkatan laut). Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini terfokus pada konflik yang terjadi antara nelayan tradisional Siantan, dengan kapal-kapal nelayan Thailand yang hadir dan menangkap ikan di wilayah mereka.

Kajian ini diuraikan dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai perilaku yang terdapat dalam masyarakat nelayan Siantan, dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk nilai-nilai apa yang masih berlaku dan telah berubah dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan Siantan. Selain itu, motivasi apa yang melatar belakangi nelayan Siantan melakukan perlawanan terhadap awak kapal Thailand dalam berbagai bentuk aksi dan penentangan. Dan apakah motivasi-motivasi yang dimiliki oleh para nelayan itu kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya perilaku keras yang diekspresikan dalam bentuk pembakaran kapal dan tindakan kekerasan lainnya. Juga bagaimana para nelayan melihat tindakan dan perilaku yang mereka ekspresikan dalam konflik ini berdasarkan pandangan mereka sendiri. Dan apa yang menjadi tuntutan mereka dalam konflik yang terjadi ini. Dalam studi yang dilakukan oleh Ruslan tentang perilaku dan motivasi yang dilakukan oleh kelompok nelayan tradisional Siantan terhadap nelayan luar dengan berbagai aksi yang dilakukan, memberikan kegunaan kepada tesis ini tentang gambaran aksi nelayan dalam melakukan perlawanan. Namun dalam tesis ini perlawanan atau aksi yang dilakukan terjadi oleh nelayan non rumpon kepada *lokal state* (dinas perikanan dan peternakan Jember) yang terkait dengan kebijakan aturan pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang bagaimana aksi yang dilakukan nelayan terhadap pemerintahan lokal.

b. Sabian Utsman (2007) *Anatomi Konflik dan Solidaritas masyarakat Nelayan di Sakates*, Konflik yang terjadi adalah antara nelayan lokal dan nelayan daerah luar. Dalam konflik tersebut terjadi perlawanan kolektif dari premitif mengarah kepada reaksioner untuk mempertahankan daerah "food security" bagi mereka. Solidaritas yang terjadi antara tahun 1998-2002 adalah solidaritas dengan dasar ikatan primordialisme, mereka mampu membangun solidaritas yang melampaui pemikiran yang sewajarnya dalam konsepsi tradisional setempat. Dalam hal penanganan konflik, sesuai fakta pola-pola yang menyebabkan kejengkelan kekecewaan nelayan lokal selama tidak kurang 23 tahun (1975-1998) paling tidak pihak-pihak yang berkompetisi tidak sedini mungkin mengolah konflik dengan baik, secara jelas tidak mampunya negara mengimplementasikan perundangan yang sudah diundangkan (kepres. No. 39/1980). Saran yang ditawarkan adalah dengan mengutamakan pertimbangan sosiologis dalam menegakkan supremasihukum, yaitu dalam peraturan perundangannya, aparat penegak hukumnya dan kultur hukum masyarakatnya. Dalam studi yang dilakukan oleh Sabian Utsman terlihat adanya konflik antara nelayan lokal dengan nelayan daerah luar. Utsman lebih menitikberatkan pada bagaimana bentuk dasar ikatan solidaritas dari perlawanan yang dilakukan oleh nelayan lokal. Solidaritas primordialisme merupakan unsur utama dalam perlawanan tersebut. Hal ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran

mengenai bagaimana solidaritas dari perlawanan nelayan. Ikatan solidaritas primodialisme bukanlah satu-satunya ikatan yang ada dalam nelayan untuk kemudian melakukan perlawanan. Tidak menutup kemungkinan adanya hal lain yang lebih kuat atau melebihi ikatan primodialisme. Konflik rumpon yang ada di komunitas nelayan Puger ikatan solidaritas untuk melakukan aksi atau perlawanan bisa juga didukung oleh ikatan solidaritas primodialisme atau mungkin dibentuk oleh ikatan solidaritas yang lain. Oleh karena itu dalam tesis ini ikatan solidaritas yang lain itu juga diidentifikasi sebagai upaya untuk melihat secara menyeluruh bagaimana aksi kolektif itu dilakukan. Studi-studi tentang berbagai konflik nelayan yang terjadi tersebut secara umum memberikan gambaran tentang bagaimana konflik-konflik kenelayanan terjadi. Studi tentang konflik yang disebabkan oleh alat tangkap dan armada yang digunakan nelayan merupakan aspek yang paling dominan dalam komunitas nelayan. Selain itu aspek ikatan solidaritas sosial juga mewarnai konflik kenelayanan. Kondisi perairan Indonesia yang masih menganut *open acces* juga berperan dalam konflik kenelayanan. Selain hal yang telah diuraikan di terdapat aspek lain yang memicu adanya konflik dalam komunitas nelayan, yaitu tentang keberadaan rumpon. Rumpon adalah alat bantu penangkapan nelayan, yang kemudian menimbulkan konflik, karena dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan. dimana akhirnya terdapat suatu kesenjangan yang kemudian menimbulkan konflik.

Tidak hanya itu saja peraturan/kebijakan tentang pemasangan dan pemanfaatan yang tidak sesuai diterapkan oleh pemerintahan lokal menambah konflik semakin terbuka. Studi tentang bagaimana konflik rumpon serta kebijakan yang berlaku didalamnya, terutama yang terkait dengan aksi kolektif yang dilakukan nelayan belum banyak dilakukan. Oleh karena studi ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana aksi kolektif nelayan non rumpon serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.

2. Masyarakat Dan Kelompok Sosial

Ada beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli diantaranya

Adalah sebagai berikut : Soerjono Soekanto, {2006 22} bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas – batas yang dirumuskan dengan jelas.

Pengertian lain dikemukakan oleh Emile Durkheim (dalam Solean

H, Taneko, 1984: 11 }

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota – anggotanya .

Masyarakat adalah kumpulan dari banyak keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh masing-masing individu. dimana faktor utamanya yang menjadi dasar adalah interaksi sosial antara individu dengan keluarga juga individu dengan keluarga lainnya. hingga kini belum ada keseragaman pendapat di antara para sosiolog mengenai definisi kata “group” (kelompok). namun demikian ada definisi yang

mungkin paling dapat diterima, yaitu sebagai berikut : kelompok adalah sejumlah orang yang berinteraksi secara bersama-sama dan memiliki kesadaran keanggotaan yang di dasarkan pada kehendak perilaku yang di sepakati. kelompok sosial adalah himpunan / kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. bisa diartikan juga bahwasanya kelompok sosial adalah kelompok yang terorganisasi dengan baik sekali seperti negara. bahkan yang tidak terorganisasi seperti kerumunan orang.

a. Bentuk dan jenis organisasi sosial.

Anggota-anggota suatu masyarakat di organisasikan kedalam banyak macam kelompok (group), organisasi-organisasi (organization) dan kekeluargaan (relation ship). Menurut mayor Polak, dikatakan sebagai "sejumlah orang yang ada antar hubungan satu sama lain dan antar hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur." Struktur di maksudkan sebagai "suatu susunan dan pola antar hubungan intern yang agak stabil. Biasanya sebuah struktur kelompok terdiri atas:

- 1) Suatu rangkaian status atau kedudukan-kedudukan para anggotanya yang hirarkhis (tersusun dari atas kbawah).
- 2) Sosial roles atau peranan-peraenan sosial yang berkaitan dengan kedudukan peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan kedudukan (status) itu, dan,
- 3) Unsur-unsur kebudayaan (nilai,norma,model-model dan sebagainya) yang mempertahankan, membenarkan, dan mengagumkan."

b. Fungsi struktur sebuah kelompok ialah:

- 1) Menjamin kelangsungan hidup atau kontinuitas kelompok.
- 2) Memungkinkan pelaksanaan kelompok.

Kelompok orang yang tanpa antar hubungan di antara anggota-anggotanya di sebut agregasi, bak segenggam pasir kering, akan bercerai berai bila genggam di lepaskan. Kelompok yang tidak berstruktur di sebut quasi group atau kuasi kelompok. Kuasi kelompok ini dapat di berikan struktur dan menjadilah sebagai kelompok. Struktur buatan secara sengaja itu di sebut organisasi. Misalnya, sebuah pemuda yang mempunyai antar hubungan di sebut kuasi kelompok. Tetapi jika kemudian didirikan perkumpulan pemuda, artinya memberikan struktur kepada kuasi kelompok ini, maka jadilah perkumpulan pemuda itu sebagai satu kelompok. Hal demikian di sebut pengelompokan (*groupment*) dan bukan sebagai group (kelompok). Pengelompokan (*groupment*) ini di bedakan atas :

- a) Pengelompokan tanpa struktur,
- b) Pengelompokan yang berstruktur, dan
- c) Pengelompokan yang di beri struktur dengan sengaja (strukturabel).

Bentuk-bentuk kelompok sosial itu bermacam-macam. Dapat di lihat dari berbagai segi, seperti : dari hubungan darah (keturunan/keluarga), dari hubungan tinggal dekat, dari ikatan persekutuan darah setempat, dari segi organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu misalnya segi ekonomi, politik, agama, cultural, seni, juga dapat di lihat dari besar/kecilnya jumlah anggota, dari lama/tidaknya sifat hubungan sosial yang di lakukan dan masih banyak lagi yang lain.

In-group dan out-group atau perasaan dalam dan luar kelompok. dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap kelompok sosial merupakan in-group bagi anggotanya. sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group. perasaan in-group dan out-group di dasari dengan suatu sikap yang di namakan dengan etnosentris yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik di banding dengan kelompok lainnya. sikap ini menimbulkan stereotip yaitu gambaran / anggapan yang bersifat mengejek terhadap suatu obyek tertentu. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja di ciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. contohnya organisasi.

Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang di dasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. contohnya genk.

Derajat Organisasi:

- 1) Berdasarkan tingkatannya, misalnya RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Negara.
- 2) Dalam membicarakan kelompok sosial harus hindari paham prasangka:
- 3) Kelompok-kelompok sosial merupakan lawan individu
- 4) Hanya dapat dimengerti jika dipelajari di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain (sebagai pasangan).

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kelompok sosial tertentu seperti publik dan kerumunan merupakan ancaman bagi kesejahteraan individu.

Hal ini bisa terjadi karena mereka menganggap, kalau kelompok sosial hanya bisa dilakukan dengan berpasangan, padahal yang namanya kerumunan dan publik, sifatnya tidak tetap. Jelaslah mereka tidak akan mendapatkan kesejahteraan, yang ada mereka hanya mendapat ancaman.

3. Dinamika Kelompok Sosial

Dinamika kelompok sosial, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. perubahan dalam setiap kelompok sosial, ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan dengan ccepat. perubahan dalam kelompok sosial ada yang di sebabkan oleh faktor intern dan ekstern. faktor intern di sebabkan adanya perubahan struktur dalam kelompok sosial menyebabkan ketidak stabilan kelompok. faktor eksternal yaitu dari luar kelompok, mungkin terjadinya antagonisme antar kelompok.

Faktor-faktor perubahan struktur antara lain :

- a. Faktor situasi
- b. Faktor pengertian anggota-anggota kelompok
- c. Faktor pengertian anggota-anggota kelompok.
- d. Faktor perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi.

Persoalan-persoalan yang di hadapi oleh kelompok menurut robert f. bales, sesuai dengan pengalamanya, maka ada empat persoalan besar yang harus di selesaikan oleh kelompok.pertama; kelompok harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan faktor-faktor yang ada di luar kelomok yang mungkin memiliki

pengaruh terhadap fungsi kelompok.kedua; kelompok harus memelihara mekanisme control yang bersifat internal yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.ketiga; harus ada kaitan tempat mengenai pendapat para anggota kelompok. keempat; harus ada pemeliharaan tempat terhadap integrasi antara para anggota kelompok.

Kelompok-kelompok sosial yang berkembang bukan merupakan kelompok-kelompok yang statis. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan, hal ini yang dinamakan dinamika kelompok sosial.Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Berubahnya struktur kelompok sosial
- b. Pergantian anggota kelompok
- c. Perubahan situasi politik, sosial, ekonomi.

Masalah dinamika kelompok juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif. Dan itu bisa menjadi suatu tindak agresif.sebab sebab suatu kolektiva menjadi agresif:

- a. Frustrasi dalam jangka waktu yang lama
- b. Tersinggung
- c. Dirugikan
- d. Ada ancaman dari luar
- e. Diperlakukan tidak adil
- f. Menghadapi masalah kehidupan yang tidak agresif. .Dinamika sosial yang diharapkan adalah dinamika yang progresif menuju kemajuan dan kesejahteraan.

4. Peranan

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut. Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut : Peran yakni laku; hal berlaku atau bertindak, pemeran, pelaku, pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan.

Dalam kamus sosiologi, disebutkan bahwa peranan adalah :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan,
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban,
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan
- d. Bagian dari seseorang yang mempunyai bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Sedangkan Horton dan Hubt (1886) mengemukakan bahwa

peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahkan dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai perangkat peran. Istilah seperangkat peran (*Role Set*) digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peranyang saling berhubungan dan cocok.

Menurut Selo Sumarjono, (2011)

Peran (*Role*) adalah aspek dinamis dari kehidupan (*Status*) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan social seseorang, antara status dan role sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan.

Sedangkan menurut Soekanto (1990:268)

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran,. Karena peran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga dimasyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya

Sedangkan menurut pengertian dalam kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara, maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang peran diantaranya sebagai berikut :
- d. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Peran dalam artimerupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- e. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
- f. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi perilaku struktur sosial.

Pengertian peranan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.L.S. Poerwadarminta (2000:366), mengemukakan bahwa pengertian peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Sedangkan dalam kamus istilah Antropologi mengartikan peranan sebagai perilaku pemain sandiwara yang mempersonifikasikan sesuatu watak manusia tertentu.

Sementara itu pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:2003) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Konsep tentang peran (Role) menurut Komaruddin (1994:768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sbagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. Berdasarkan pengertian peran yang dipaparkan komaruddin dapat diambil pengertian bahwaperanan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagaian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah dalam pembangunan sangat luas mengingat peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang efisien, efektif, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Peranan penting artinya karena dapat mengatur perilaku seseorang dimana pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian orang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain atau sekitarnya. Jadi peranan yang dimaksud peneliti adalah bagaimana peranan pemerintah atau birokrasi pemerintahan di dalam mengambil keputusan.

5. Konflik

Pribadi maupun kelompok yang menyadari adanya perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badania, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-polaprilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (konflik). Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa

memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (kamus sosiologi, 1985 : 85
Konflik merupakan bentuk integrasi dimana tempat ,waktu serta intensitas dan
lain sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana isi segitiga yang dapat
berubah. Coser mengambil pembahasan dari simmel, mengembangkan proposisi
dan memperluas konsep simmel tersebut dalam menggambarkan kondisi-kondisi
dimana konflik secara positif membantu struktur sosial dan terjadi secara negatif
akan memperlemah kerangka masyarakat. Coser membahas ahli teori (bangsa
amerika) yang lebih awal, menyatakan pemahaman mereka tentang sebagai
kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat.

Albion small dan george E. vincen sebagai pengarang terkenal buku teks
pertama sosiologi amerika, misalnya mencerminkan orientasi pembaharuan
sosiologi ketika menulis, sosiologi dilahirkan dalam semangat modern untuk
memperbaiki masyarakat (Margaret M. Poloma 1994 : 107). Konflik sosial yang
menjadi objek sosiologi harus benar-benar merupakan fakta sosial, sungguh terjadi
dan dapat di observasi. Itu berarti ada dua pihak bukan hanya satu pihak yang
terlibat dalam konflik, dan masing-masing mau menghancurkan lawan atau
membuatnya tak berdaya. Akibat lain ialah terhentinya kerja sama antara kedua
pihak yang terlibat konflik. Masa antarah pecahnya konflik dan terbentuknya
kerjasama kembali disebut masa permusuha. Dalam masa ini usaha kooperatif
tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses kemajuan masyarakat
mengalami kemacetan.

Apabila konflik terjadi di suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, konflik juga menghambat persatuan bangsa serta dan interaksi sosial dan nasional.(Drs. D .Henrpuspito OC, 1989 : 248).

Akan tetapi para ahli sosiologi kontemporer sering mengacukan analisa konflik sosial, secara implisit melihatnya sebagai desktruktif atau patologis bagi kelompok sosial. Coser memilih menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensia positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur. Dia melakukan hal ini dengan membagun diatas sosiologi klasik pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konflik sosiologi jerman yang terkenal yaitu George Simmel. Jelaslah bagi coser maupun kaum fungsionalisme struktural, struktur sosial ada di dalam dirinya sendiri dan bergerak melalui kendala. Coser mengungkapkan hal itu sebagai berikut : “sosiologi konflik harus mencari nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang tertanam secara struktural sehingga membuat manusia saling terlibat dalam konflik, bilamana ia tidak ingin dilarutkan kedalam penjelasan psikologis mengenai agresivitas bawaan, dosa turunan, atau kebengalan manusia. Apa yang disumbangkan Coser kepada *orientasifungsionalisme* ialah deskripsi mengenai bagaimana struktur-struktur sosial itu dapat merupakan produk konflik dan bagaimana mereka mempertahankan oleh konflik. Prosisisnya sebagian besar berkisar di seputar intensitas dan fungsi konflik bagi lembaga-lembaga sosial. Waaupun Coser terikat pada kesatuan teori masyarakat yang ilmiah, tetapi ia menolak setiap gerakan kearah naturalisme atau determinisme yang ekstrim pada setiap tindakan manusia (Margaret M. Polman, 1994 : 125).

Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-kesimpulan yang berbeda-beda, dan apabila mereka cenderung bersifat toleran, maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu. Berdasarkan risalah konflik (dari Simmel) sebagai bentuk dari asosiasi, Coser membentangkan proporsi untuk menguji fungsionalisme konflik bagi kelompok sosial. (Margaret M. Polman, 1994 : 127)

Tentang fungsi pertikaian, Ritzer dengan mengutip Berghe, (1986) melukiskan sebagai berikut :

- a. Berbagai alat untuk memelihara solidaritas.
- b. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
- c. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.
- d. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tetapi dengan adanya konflik posisi dan batas antara kelompok tahu secara pasti diman mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak lebih cepat. (Taneko, 1994 : 74).

Konflik dapat merupakan proses yang instrumental dalam pembentukan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dengan kelompok lain dapat garis batas antara dua atau lebih kelompok dan melindunginya agar tidak lebur dalam dunia sosial sekelilingnya. (Margaret M. Polman, 1994 : 108).

Intensitas konflik dalam suatu sistem dapat ditelaah dengan cara memusatkan perhatian hubungan timbal balik antara variabel-variabel

- a. Keterlibatan emosional para partisipan.
- b. Keterlibatan struktur sosial.
- c. Taraf realisme dari konflik..-
- d. Taraf obyektifitas diatas kepentingan-kepentingan pribadi walaupun semua variabel dianggap penting. Coser cenderung memberikan prioritas pada proposisi pertama dan kedua yang dianggapnya menentukan apakah konflik diobjektifikasikan realitas, dan menjangkau nilai-nilai (Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Ratih Iestari, 1988 : 96).

B. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori Peranan dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung pada lingkungan sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia

menduduki fungsi yang bermacam-macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Merton dalam Raho (2007 :67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai

bagian struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola peranan yang saling berhubungan

2. Teori Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah

teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Teori yang disampaikan oleh Karl Marx {1818-1883}, bagi Mark

konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan. Teori konflik Mark yang terkenal adalah teori konflik kelas dimana dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kaum borjuis selalu mengeksploitasi kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus pada akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial.

Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam sosiologi adalah teori yang disampaikan oleh

Lewis A. Coser {1913-2003}. Coser berusaha merangkum dua perspektif yang berbeda dalam sosiologi yaitu teori fungsionalis dan teori konflik. Pada intinya coser beranggapan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Ketika konflik berlangsung Coser melihat katub penyelamat dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan.

Katub penyelamat adalah mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katub penyelamat merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sistem atau struktur sosial. Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang disebabkan tuntutan khusus yang dilakukan oleh partisipan terhadap objek yang dianggap mengecewakan.. Konflik

non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan khusus, melainkan untuk meredakan ketegangan salah satu pihak.

Ralp Dahrendorf {1929}, teori dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori konflik Mark. Karl Marx(1818) berpendapat bahwa kontrol sarana produksi berada dalam satu individu yang sama. Dahrendorf menolah asumsi ini dengan alasan telah terjadi perubahan drastis dalam masyarakat, yaitu antara masa dimana Mark menyampaikan teorinya dengan masa Dahrendorf.

Munculnya dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan timbulnya kelas menengah baru merupakan dasar dari teori Dahrendorf. Dekomposisi modal ditandai dengan munculnya korporasi dengan saham yang dikontrol orang banyak. Dekomposisi tenaga kerja adalah munculnya orang ahli yang mengendalikan suatu perusahaan. Timbulnya kelas menengah baru dari buruh terampil dalam suatu perusahaan yang dibawahnya terdapat buruh biasa dengan gaji rendah.

Dalam perkembangannya teori konflik dibahas lebih spesifik dengan lahirnya cabang baru sosiologi yang membahas tentang konflik yaitu sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik diungkapkan oleh George Simmel tahun 1903 dalam artikelnya *The Sociology of conflict*. George simmel kemudian dikenal sebagai bapak dari sosiologi konflik. Dalam tulisan berikutnya akan dibahas beberapa tokoh dan pandangannya mengenai teori konflik seperti Max Weber, Emilie Durkheim, Ibnu Khaldun dan George simmel, teori Karl Marx tidak akan dibahas disini karena telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya.

Ibnu Khaldun (1982) menyampaikan bahwa bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun *tribal*. Kelompok

sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik (Novri Susan 2009:34). Dari sini dapat kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan kekuasaan.

Max Weber{1864-1920}, berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya (Novri Susan 2009:42).

Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting *power* (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. *Power* (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan *power* (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik. Emile Durkheim dalam salah satu teorinya gerakan sosial menyebutkan kesadaran kolektif yang mengikat individu-individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Kesadaran kolektif ini merupakan unsur mendasar dari terjaganya eksistensi kelompok. Anggota kelompok ini bisa menciptakan bunuh diri altruistik untuk membela eksistensi kelompoknya (Novri Susan 2009:45). Walaupun tidak secara tersirat membahas teori konflik namun teori Weber ini pada dasarnya berusaha untuk menganalisa gerakan sosial dan konflik. Gerakan sosial bagi Weber dapat memunculkan konflik seperti yang terjadi pada masa Revolusi Prancis.

George Simmel (1985) berangkat dari asumsinya yang bersifat realis dan interaksionalis. Bagi Simmel ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi (individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok). Simmel menyatakan bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab konflik.

Simmel berargumen ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal (Novri Susan 2009:48). Permusuhan timbal balik tersebut mengakibatkan terbentuk stratifikasi dan divisi-divisi sosial, yang pada akhirnya akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial.

3. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat dihiri. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak

jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Menurut Johan Galtung (2007: 93) ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu :

- a. *Peacekeeping* Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
- b. *Peacemaking* Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.
- c. *Peacebuilding* Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Adapun peranan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya Konflik yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar publik.
- b. Optimalisasi pelayanan publik.
- c. Penataan kota yang berkeadilan.
- d. Pengektifan fasilitas umum.
- e. Pembinaan organisasi berbasis etnis.
- f. Pengupayaan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
- g. Penegakan hukum yang berkeadilan.
- h. Manajerial pengelolaan perijinan aktivitas politik.
- i. Mengupayakan pemenuhan lapangan kerja.
- j. Melibatkan tokoh masyarakat sebagai 'kepanjangan tangan' pemerintah untuk melakukan penyuluhan.
- k. Memperkuat basis keagamaan sebagai bagian dari proteksi dari radikalisasi.
- l. Mengoptimisasikan pendidikan bela Negara.
- m. Optimalisasi program-program keserasian nasional.
- n. Mengektifkan program-program untuk meminimalisir konflik dan kerawanan sosial dengan pendekatan kearifan lokal.

C. Kerangka Pikir

Untuk memahami dan mengetahui strategi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik antara kelompok di Dusun Soreang dan Dusun Lempong Kabupaten Takalar maka penelitian ini menggunakan kerangka pikir yang sistematis.

Pertama, melakukan identifikasi fenomena penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan survey awal ke lapangan untuk mengetahui permasalahan permasalahan terkait penelitian ini yaitu strategi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik antar kelompok. Selain melakukan identifikasi, survey ini juga digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang lokasi penelitian.

Kedua, merancang konsep penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan dan meneliti permasalahan secara jelas. Selain itu, pada tahap ini juga peneliti menentukan waktu serta informasi yang berkaitan dengan data penelitian yang didapatkan dari buku-buku referensi dan juga hasil observasi di lapangan.

Ketiga, pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik antara kelompok di Dusun Soreang dan Dusun Lempong Kabupaten Takalar. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh adalah data tentang strategi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik antara kelompok yang dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator yaitu, pemerintah dan tokoh masyarakat mampu mengidentifikasi jenis-jenis konflik antara kelompok yang

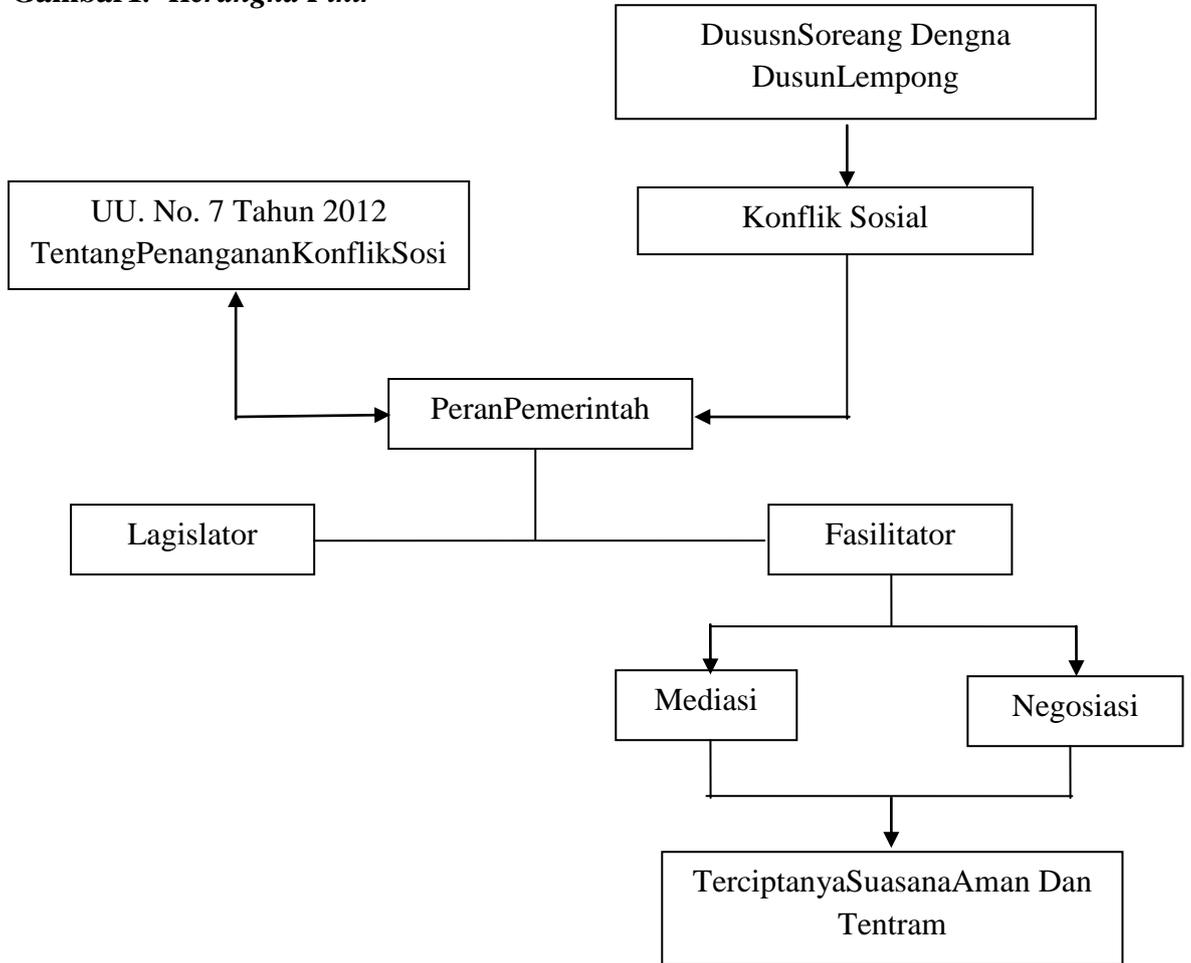
terjadi, pemerintah dan tokoh masyarakat memahami persoalan atau situasi konflik yang terjadi, pemerintah dan tokoh masyarakat menentukan langkah dan tujuan penyelesaian konflik, pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan tindakan penanganan atau penyelesaian konflik antara kelompok, kemudian pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan evaluasi konflik antara kelompok.

Keempat, peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan sebelumnya. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Kelima, penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah tahap akhir penelitian, dimana penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dan juga analisis data.

Berdasarkan tahap-tahap di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian model deduktif. Model deduktif adalah menggunakan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan melakukan uji data. Setelah melihat uraian kerangka pikir yang di atas, maka untuk lebih memudahkan memahami kerangka pikir penelitian ini, dapat dilihat skema dibawah ini:

Gambar1: Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus, Penelitian kualitatif ini adalah peneliti untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka , dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu, peneliti harus terjun dalam lapangan dengan waktu yang cukup lama.

Studi kasus yang dimaksud adalah strategi riset penelaran (*penelitian*) empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti bukti kualitatif yang berdasar pada berbagai berbagai sumber.Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu.Tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas.

Studi kasus (*case study*) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Dalam studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian berlokasi di wilayah Dusun Soreang dan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat, pemerintah dan tokoh masyarakat di Dusun Soreang dan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling* atau *judgmental sampling*). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti cenderung memiliki responden secara

variatif berdasarkan (alasan), sehingga dalam penelitian ini menggunakan *maximum variation smpling*. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama, informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berapa jumlah responden atau informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Hal ini karena pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang memadai

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di area atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh pengalaman tertentu, bisa terjadi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk

meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah dalam penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang *empirical induktif*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi fokus atau titik perhatian dalam penelitian ini adalah;

4. Bagaimana bentuk konflik kelompok di Dusun Soreang dan Dusun Lempong.?
5. Faktor-faktor apakah yang menjadi pemicu terjadinya konflik kelompok di Dusun Soreang dan Dusun Lempong ?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik kelompok di Dusun Soreang dan Dusun Lempong di Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar ?

E. Instrument penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah kuesioner atau panduan wawancara. Kuisoner digunakan untuk penyelidikan mengenai suatu masalah

yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dengan cara mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada subjek untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respons) tertulis seperlunya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan untuk meneliti variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibekukan, tapi ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data yang akurat.

Peneliti dapat mengetahui secara langsung melalui proses melihat dan merasakan makna-makna tersembunyi yang dimunculkan oleh subjek penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai *Human Instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih fenomena sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya.

F. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi atau wawancara terhadap masyarakat, pemerintah dan tokoh masyarakat di Dusun Soreang dan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar.. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi. wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui fenomena konflik antara kelompok.

1. Obsevasi

Obsevasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data. Dalam penelitian ini, dimana penelitian atau pengamatan melihat situasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap obyek yang diteliti. Menurut James dan Dean (1980) menyatakan bahwa observasi adalah: mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang menghasilkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis. Guba dan Lincoln (2013), mengemukakan beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya karena, (a) Teknik pengambilan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung; (b) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; (c) Pengamatan memungkinkan penelitian mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; (d) Teknik pengamatan memungkinkan penelitian mampu memahami

situasi-situasi yang rumit. Observasi langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data awal agar memberikan pengetahuan bagi peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Instrument ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkapkan dapat digali dengan baik. Wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subyek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

3. Partisipatif

Dalam partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Sugiono (2011) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu *pasive participation*, *moderate participation*, *active participation*, dan *complete participation*. Bagian dari observasi ini meliputi;

- a. Partisipasi pasif ialah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut;
- b. Partisipasi moderat ialah peneliti dalam mengumpulkan data, ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya (ada keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang luar);
- c. Partisipasi aktif ialah peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap;
- d. Partisipasi lengkap ialah peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Dengan kata lain, pada observasi ini memerlukan suasana yang natural sehingga peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Observasi ini memerlukan keterlibatan peneliti tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil gambar.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan model analisis interaktif (interaktif model) yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2011 : 247-252) mencakup tiga tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Mereduksi data atau mengelolah data dari lapangan dengan memilih dan memilah data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus penelitian yaitu: gaya hidup mahasiswa perkotaan.
2. Menyanyikan data, laporan yang sudah direduksi dari hasil penelitian dilihat kembali untuk mengetahui masih diperlukan penggalian data kembali untuk mendalami masalah atau sebaliknya.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi, ,menverifikasikan kesimpulan selama penelitian masih berlangsung.
- 4.

I. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, dan partisipatif.

2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Soreang

Desa Soreang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah kabupaten berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa, yang diana dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat motor dan mobil, dengan perjalanan yang di tenpuh dari Kota Makassar ke Kabupaten Takalar berkisar satu stengah jam.

1. Penduduk

Sampai dengan tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Mappakasungguh masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 525,08 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 37 224 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 71 orang per Km². Dengan kata lain setiap Km² luas wilayah di Kecamatan Mappasungguh secara rata-rata hanya didiami oleh 71 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 800 orang dan jumlah penduduk perempuan 1.230 orang. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 98 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Selain itu laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mappakasungguh dari tahun 2006-2007 adalah sebesar 1,88 persen.

2. Pendidikan

Meskipun jumlah dan sebarannya relatif masih terbatas, namun sarana pendidikan di Kecamatan Mappakasungguh telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SLTA. Sarana pendidikan TK bertambah 2 (dua) dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan). Sarana pendidikan SD tersebar di hampir semua desa, kecuali di Desa Patani, Kampung Baru, dan Takalar Lama. Untuk tingkat pendidikan SLTP, sarana pendidikan terdapat di Desa Soreang. Adapun sarana pendidikan SLTA terdapat di Desa Soreang. Dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya jumlah murid TK mengalami penambahan secara signifikan. Pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah murid TK adalah 192 orang sedangkan pada tahun 2006/2007 bertambah menjadi 303 orang. Hal ini diduga berkaitan erat dengan bertambahnya sarana pendidikan TK dari 6 unit menjadi 8 unit pada periode yang sama. Jumlah murid untuk tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA juga cenderung meningkat.

3. Kesehatan

Dibidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Mappakasungguh juga masih sangat terbatas. Untuk melayani 4 desa yang ada hanya terdapat 1 unit Puskesmas di Kelurahan Cilallang. Selain itu, hanya terdapat 8 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 1 praktek dokter. Adapun tenaga medis yang terdapat di kecamatan ini terdiri dari 1 orang dokter, 14 bidan, 12 bidan desa, 16 dukun bayi terlatih dan 48 dukun bayi belum terlatih.

4. Perumahan dan Lingkungan

Pada satu sisi kondisi kesehatan lingkungan di Kecamatan Mappakasungguh relatif sudah baik. Dimana sebagian besar warga di 4 desa sudah memiliki jamban sendiri dan hanya 1 dusun yang sebagian besar warganya masih belum memiliki jamban. Akan tetapi disisi lain, kondisi saluran pembuangan limbah cair dari rumah tangga di 4 desa tidak lancar, 1 desa tidak ada saluran pembuangan limbah cair dan hanya 3 desa dimana saluran pembuangan limbah cairnya lancar.

5. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Mappakasungguh terdapat fasilitas tempat ibadah berupa Masjid (21 buah), Mushalah¹ dan (4 buah). Berkenaan dengan kewajiban zakat dan infak bagi pemelukmurid untuk tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA juga cenderung meningkat.

6. Pertanian dan Perkebunan

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Mappakasungguh mempunyai potensi yang besar dibidang pertanian. Pengelolaan sector pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Mapsu. Pada tahun 2007, produksi padi di kecamatan ini mencapai 12.719,92 Ton yang dihasilkan dari lahan seluas 2.838,85 Ha. Selain itu produksi Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar berturut-turut adalah 2.652,60 Ton, 150,10 Ton dan 66,24 Ton. Dari beberapa jenis alat-alat pertanian yang digunakan, alat yang paling banyak

digunakan yaitu semprotan (7.733 buah). Jumlah keluarga pertanian yang berusaha di sektor tanaman pangan sebanyak 5.689 keluarga.

7. Peternakan dan Perikanan

Sapi merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Mappakasungguh. Pada tahun 2007, populasi Sapi mencapai 960 ekor. Selain itu juga terdapat Kerbau (110 ekor), dan Kambing (362 ekor) dan. Selain itu, jenis unggas yang paling banyak terdapat adalah Ayam Buras dengan populasi mencapai 29.667 ekor.

8. Perdagangan dan Hotel Kegiatan

perdagangan di Kecamatan Mappakasungguh didukung oleh keberadaan toko/warung sebanyak 373 buah dan rumah makan sebanyak 34 buah. Selain itu untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk setempat terdapat 1 unit KUD dan 5 unit koperasi Non-KUD.

9. Transportasi dan Komunikasi

Sarana komunikasi di Kecamatan Mappakasungguh masih sangat terbatas. Untuk melayani keperluan komunikasi penduduk Kecamatan Mappakasungguh hanya terdapat 2 wartel yang tersebar di 4 desa. Selain itu juga belum terdapat Kantor Pos di Kecamatan Mappakasungguh. Kondisi jalan di kecamatan ini relatif masih belum baik. Dari 4 desa yang ada, hanya 3 desa yang sebagian besar permukaannya berupa Aspal. Sementara itu, 7 desa sebagian besar jalannya rusak.

B. Gambaran umum khusus Dusun Soreang dan Dusun Lempong

1. Letak Geografis Dan Keadaan Alam.

Kecamatan Mappakasungguh adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Taalar dimana Desa Soreang termasuk dalam wilayahnya.

Secara geografis Desa Soreang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Patani
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sanro Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pattallassang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laikang

Luas wilayah Desa Soreang kurang lebih 3206 ha, yang terdiri atas yaitu :

- a. Dusun Soreang
- b. Dusun Taipa
- c. Dusun Lempong
- d. Dusun Lampang

Pusat pemerintahan berada di Dusun Soreang yang terletak di jalan Kabupaten, yang jaraknya dari pemerintahan kurang lebih 1 km, dan jarak dari ibu Kota Kabupaten (Takalar) kurang lebih 500 m arah Utara. Untuk mencapai daerah ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam dari Kota Makassar dan 30 menit dari ibukota kabupaten (Takalar). Seperti halnya di Desa-Desa lain di Kabupaten Takalar, Desa Soreang termasuk di dalam dataran tinggi yang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis suhunya berkisar antara 29C-30C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai mei, sedangkan juli sampai agustus penduduk

buangin sebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini tergantung perubahan musim, terutama dalam hal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian coklat dan padi sawah. Keadaan tanah di Desa Soreang lumayan sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman coklat. Sebagian lagi daerah yang besar cocok untuk persawahan terutama untuk padi, selain itu banyak tanaman-tanaman jangka pendek. Pembagian lahan desa yang digunakan oleh penduduk di desa Buangin dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Perkebunan coklat merupakan pembagian lahan yang paling besar di Desa Buangin yaitu 31.2%, disusul oleh bangunan perumahan 30.2%, kemudian persawahan 29,9% bangunan umum mempergunakan lahan yang paling sempit 0.1%. Perkebunan coklat umumnya jauh dari pemukiman masyarakat Desa Soreang, dimana perumahan berjejer saling berhadapan dan yang paling mereka usahakan bentuk rumah lebih mengarah kepada bentuk rumah khas Makassar. Luas rumah rata-rata 20 x 35 meter, tetapi pada umumnya memiliki halaman yang luas sedangkan dinding rumah sudah ada yang permanen berupa tembok. Ada pula yang semi permanen.

2. Keadaan Penduduk.

a. Sejarah Singkat Desa Soreang.

Desa Soreang adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar. Desa Soreang adalah Desa yang paling tua yang ada di Kecamatan Mappakasungguh. Desa ini adalah desa yang memiliki penduduk paling banyak di Kecamatan Mappakasungguh, jumlah penduduknya sebanyak 4067 jiwa. Dan memiliki lahan yang sangat luas 3206 ha.

b. Jumlah Penduduk

Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 1.854 jiwa terdiri dari laki-laki dan 800 jiwa perempuan 1.054 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak di banding penduduk laki-laki, dan jumlah itu terdapat 1.854 kepala keluarga. Secara terperinci jumlah penduduk penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini

Tabel 11. jenis kelamin dan jumlah penduduk Desa Soreang

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	800
2	Perempuan	1.054
	Jumlah	1.854

sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduk yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama). Bila di bandingkan dengan yang buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah memadai terbukti dengan adanya sebuah taman kanak-kanak (TK) dan sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah menengah pertama (SMP) dan sebuah sekolah menengah atas (SMA) walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk desa buangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	TK	93
2	SD	800
3	SMP	200
4	SMA	75
5	PERGURUAN TINGGI	2
	Jumlah	1.105

Desa yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, desa ini dahulu termasuk kedalam wilayah Desa Buangin, tetapi sekitar tahun 1994 terpecah menjadi sebuah Desa yang di kepalai oleh H.Abd. Hamid, tahun 1998-2002 dikepalai oleh H.Abd. Hamid, dan 2002-di epalai lindu. Dahulu desa ini perna jadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII, yang pada saat itu masih berupa hutan belantara, daerah ini terakhir di kuasai sekitar 1964 dan gerombolan itu pun bergerak keluar dari hutan menuju Kota Palopo. Pada saat keluar gerombolan dari daerah itu, masyarakat setempat baru mulai merintis dan membuka lahan pertanian dan perkebunan di daerah hutan belantara tersebut. Selang satu tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1965, tibalah pendatang dari suku toraja baik yang langsung dari toraja sampai pada pendatang yang sudah lama menetap di palopo sebelumnya. Karena mendapat kabar banyak lahan yang tersedia di dandang yang belum di dimanfaatkan, maka mereka pun berangkat kedesa tersebut walaupun hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja. Pada saat kedatangan mereka masih bernama desa buangin dan diterima oleh kepala

desa pada saat itu, H. Abd. Hamid. Jadi dapat di katakan, bersamaan dengan pembukaan lahan yang dilakukan oleh penduduk asli, pendatang tiba di Desa Dandang, meskipun pada saat itu ada persawahan tetapi dalam jumlah yang kecil. Selain itu masih banyak tanah yang masih berupa hutan dan dan tanpa pemilik dan akhirnya dibagi-bagikan kepada pendatang tetapi ada sebagian kecil yang tetap mereka beli. Desa ini memiliki penduduk sebanyak 1951 jiwa terdiri dari 976 jiwa penduduknya adalah laki-laki dan 975 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dapat di katakan hampir seimbang dan jumlah itu terdapat 390 kepala keluarga. Secara terperinci penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dengan melihat sarana sosial yang ada di Desa Dandang dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan Desa Dandang dapat di golongan baik. Sarana pribadi seimbang antara pendatang dan penduduk asli ini menandakan bahwa besarnya toleransi antar ummat beragama di desa ini. Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk Desa Dandang tidak mau ketinggalan dengan berita yang terjadi. Mereka menambah pengetahuan dan memperoleh berita-berita melalui siaran radio dan televisi yang mereka miliki.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Informan Penelitian

Berbicara mengenai konflik yang terjadi antara Dusun Soreang dengan Dusun Patani tidaklah semuda yang kita bayangkan. Karena kita berbicara konflik dan bagaimana penanganannya oleh pihak terkait dan ini merupakan pembahasan yang sangat sensitif di mata masyarakat setempat, karena jangan sampai mereka menganggap bahwa penelitian ini hanyalah sebagai mata-mata atau bisa saja dianggap sebagai profokator sehingga muncullah kembali konflik. Namun alhamdulillah dalam hal ini penulis mampu meyakinkan kepada masyarakat atau informan bahwasannya ini hanya sekedar penelitian, tidak ada maksud lain dalam hal ini sebagai profokator seperti anggapan masyarakat sehingga penulis mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah setempat maupun masyarakat yang mana mampu membantu penulis untuk mendapat informasi terkait apa yang penulis teliti. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang berpedoman pada pedoman wawancara yang akan dibahas secara berurutan. Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan dari Dusun Soreang, Dusun Lempong, Camat Mappakasungguh, dan Pihak Kepolisian yang ada di Kecamatan Mappakasungguh. Dilanjutkan dengan membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara kelompok pemuda Dusun

Soreang Dan Dusun Lempong. Kemudian membahas mengenai bagaimana peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik yang terjadi antara kelompok pemuda Dusun Soreang dan Dusun Lempong. Informan dalam penelitian ini adalah, diantaranya Kepala Dusun Soreang, Tokoh Pemuda Desa Soreang, Tokoh Perempuan Desa Soreang, dan Kepala Desa Soreang sendiri. Informan dari Dusun Lempong diantaranya Kepala Dusun Lempong, Tokoh Pemuda Desa Soreang, dan Kepala Desa itu Sendiri. Kemudian Informan selanjutnya yaitu Camat .Mappakusungguh. Kemudian informan terakhir dari pihak Kepolisian . Adapun data dari informan tersebut yaitu sebagai berikut

1. SR adalah seorang Kepala Desa di Desa Soreang. Lahir pada tanggal 12 Maret 1972, tempat tinggal SR di Desa Soreang, SR beragama islam, pendidikan terakhir SLTA. SR juga seorang PNS (pegawai negeri sipil) sekaligus kepala keluarga dia memiliki 4 orang anak dan seorang istri.
2. BN adalah seorang Kepala Dusun di Desa Soreang. Lahir pada tanggal 05 September 1968, tempat tinggal BN di Desa Soreang Dusun Soreang, BN beragama Islam, pendidikan Terakhir SLTA. SM juga berprofesi sebagai petani dan wiraswasta.
3. RW adalah Kepala Dusun Lempong. Lahir pada tanggal 04 Oktober 1969, tempat tinggal RW di Desa Buangin Dusun Tarue, RW beragama islam, pendidikan terakhir SLTA. RW Berprofesi sebagai Wiraswasta. Memiliki 4 orang anak dan seorang istri.
4. AH adalah Tokoh Pemuda di Desa Soreag. Lahir Pada tanggal 1 Desember 1993. Tempat tinggal AH di Desa Soreang Dusun Soreang. AH beragama

Islam. Pendidikan terakhir SLTA. AH berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil). Memiliki 3 orang anak dan seorang istri.

5. DD adalah Tokoh Perempuan di Dusun Soreang. Lahir pada tanggal 30 Desember 1970. Tempat tinggal AF di Desa Soreang Dusun Soreang. AF beragama Islam. Pendidikan Terakhir SLTA. AF juga berprofesi sebagai Staf pegawai Kantor Desa Soreang. Memiliki 3 Orang anak dan seorang suami.
6. KH adalah Tokoh Pemuda Di Desa Soreang Dusun Lempong. Lahir pada Tanggal 03 Maret 1987. APTinggal di Desa Dandang Dusun Dandang II. AP Beragama Islam. Pendidikan terakhir SLTA. AP juga berprofesi sebagai Guru di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Desa Dandang.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Kurangnya lapangan kerja dan Masalah Minuman Keras Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan. Faktor Kesenjangan Sosial Faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi Ketersinggungan. Karena adanya Profokator Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar Pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong diantaranya yaitu: Kurangnya lapangan pekerjaan dan Masalah Minuman Keras sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh SR tentang salah satu penyebab terjadinya konflik kelompok, dalam pernyataan masyarakat bahwa:

bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong kurang aktifitas, karena kurangnya aktifitas para pemuda sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan melakukan kegiatan minum-minuman keras. Ini merupakan salah satu alasan sehingga kerap terjadi perkelahian antara pemuda sehingga dari

perkelahian tersebut menjadi sebuah konflik yang besar. Dari semua informan yang didapatkan dilapangan menganggap bahwa kurangnya lapangan pekerjaanlah sehingga sering terjadi konflik. Seperti penuturan dari informan di antaranya : SR (46 Tahun) : “

kurangnya lapangan pekerjaan di Takalar ini mie juga yang memicu terjadinya konflik karena berkurangnya aktifitas masyarakat sehingga mereka biasanya banyak mengonsumsi minuman keras yang bisa membuat mereka tidak sadar sehingga mereka biasaya mengganggu orang yang melintas di daerah tersebut”(wawancara 12 Oktober 2017).

Hal ini di benarkan oleh BN (53 Tahun) “

salah satu pemicu terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan kerja yang ada di Kab. Takalar yang membuat masyarakat kurang aktifitas, yang mana pemuda-pemuda hanya bisa mengonsumsi minuman keras ”(wawancara, 13 Oktober 2017).

Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan

Berdasarkan hasil dari informan yang di dapatkan melalui informan faktor kedua yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu karena adanya konflik yang belum terselesaikan . Seperti penuturan RW

“Karena adanya masalah yang belum terselesaikan, sehingga besok-besok atau kapan, konflik tersebut bakalan muncul lagi” (wawancara 14 Oktober 2017)

“Konflik tersebut biasanya muncul karena kemungkinan adanya masalah-masalah yang belum terselesaikan, atau di ketahui oleh pihak-pihak tertentu, dari situlah dapat memicu timbulkan konflik antar pemuda di desa tersebut”. (Wawancara, 14 Oktober 2017)

Faktor Ketidak Cocokan Peran dan kesenjangan Sosial

Kemudian penyebab selanjutnya yaitu fakitor Ketidak cocokan peran dan kesenjangan sosial. Yang mana konflik ini terjadi karena adanya ketidak cocokan peran antara masyarakat Dusun Soreang dengan Dusun Lempong sehingga terjadilah kesenjangan sosial. Hal ini melibatkan para tokoh yang ada di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong. Seperti yang dituturkan oleh AF (40 Tahun)

“Salah satu faktornya itu karena Masalah kesenjangan sosial yang mana hal tersebut melibatkan para tokoh yang ada di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong”. (Wawancara 12 Januari 2017)

Kemudian di tambahkan lagi oleh JJ (51 Tahun)

“Karena adanya kesenjangan sosial, maka terjadilah konflik antara Dusun Soreang dengan Dusun Lempong. Tidak adanya kecocokan peranan sehingga hal tersebut melibatkan para Tokoh yang ada di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, sehingga merambat ke pemuda”. (Wawancara, 15 Oktober 2017)

Faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi Ketersinggungan.

Berdasarkan dari Informan, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Dusun Soreang dengan Dusun Lempong adalah karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga menimbulkan ketersinggungan. Hal ini kerap dialami para pemuda setempat. Seperti yang dikatakan oleh AP (32 Tahun)

“Anak muda sekarang itu cepat sekali tersinggung, karena tidak baiknya komunikasi di antara mereka sehingga menimbulkan prasangka, dan mengakibatkan ketersinggungan”. (Wawancara 16 Oktober 2017).

Hal tersebut di benarkan oleh JJ

“Bahwa karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemuda di Dusun Soreang dengan pemuda di Dusun Lempong, maka kerap terjadi Konflik. Ketersinggungan salah satu bukti bahwa komunikasi di antara mereka itu kurang baik. Dari hal itulah sehingga kerap menimbulkan perkelahian dan berujung pada konflik yang melibatkan para pemuda-pemuda setempat”. (Wawancara, 20 Oktober 2017)

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antara kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi .0+antara warga, khususnya anak muda yang mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama.Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh RW tentang penyebab terjadinya konflik

kelompok masyarakat Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, dalam pernyataannya menyatakan bahwa:

“Perkelahian antar pemuda disini itu diakibatkan oleh beberapa elemen dari luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor Luar yang bisa memicu perkelahian kemudian berujung menjadi konflik itu terjadi. Dalam artian masalah ini ada bisa saja terjadi karena adanya pihak ke 3 atau PROF OKATOR” (Wawancara Tanggal 14 Oktober 2017).

Akan tetapi ditegaskan kembali oleh pemerintah kecamatan, sebut saja JJ, bahwasannya :

“Isunya memang seperti itu, bahwa ada orang luar yang menjadi profokator atau dalang dari masalah konflik yang terjadi, akan tetapi saya tidak bisa mengatakan seperti itu kalau tidak ada bukti. Akan tetapi di inyisalir bahwa kemungkinan ada, akan tetapi cuman hanya sebatas kemungkinan. Polisi saja belum bisa mengungkapkan ada atau tidaknya, jadi susah kalau tidak ada bukti”. (wawancara, Tanggal 20 Oktober 2017)

Begitu pula dari pemerintah Desa menegaskan bahwa

“Disisi lain, konflik ini muncul kembali karena adanya profokator. Akan tetapi karena kurangnya bukti, jadi hal tersebut hanya dijadikan sebagai isu belaka, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa memang ada”. (wawancara 16 Januari dan 20 Oktober 2017).

Dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa, setiap masalah seperti konflik yang terjadi di Dusun soreang dengan Dusun Lempong tak luput dari orang-orang yang menjadi pihak ketiga dalam artian sebagai profokator. Akan tetapi sebelum adanya bukti yang sesuai, maka benar yang dikatakan oleh salah seorang informan bahwa, kita tidak boleh mengatakan bahwa ada profokator dibalik konflik yang terjadi sebelum adanya bukti yang kuat.

Apabila kita berbicara masalah politik, apakah ada atau tidaknya dalam konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, karena berbicara masalah faktor politik yang biasanya kerap muncul disaat ada masalah seperti konflik, maka itu tak luput dari campur tangan dari pihak-pihak

yang terkait. Seperti halnya konflik yang terjadi di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, menurut dari beberapa informan mengatakan bahwa, hal tersebut tidak di pungkiri bahwa faktor politik itu ada. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan AF (51 Tahun)

“Bahwasanya tidak dipungkiri bahwa ada faktor politik dalam konflik yang terjadi antara Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, yang mana mereka muncul setelah sekian lama konflik ini ada. Faktor politik itu ada datangnya belakangan. Pas terjadi konflik mereka muncul seolah-olah menjadi penengah, akan tetapi bisa saja mereka muncul sebagai penengah atau orang yang mampu mendamaikan bisa juga sebagai perusak, dalam hal ini sebagai Profokator”. (Wawancara Tanggal 15 Oktober 2017)

“Jangan sampai kita berfikir bahwa, konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong ini di picu karena faktor politik, itu tidak benar, karena disini konflik ini murni terjadi diluar karena masalah politik”. (JJ, Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, ternyata faktor politik bukanlah salah satu pemicu terjadinya konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, akan tetapi faktor politik itu tidak dipungki bahwa ada, akan tetapi hanya sebatas mencari kepentingan sendiri. sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh pemnerintah keamanan mappakasungguh tentang upaya pemnerintah dalamn mn engatasi konflik dalamn pernyataannya mnenyatakan bahwa

Posisi saya dalam konflik ini saya tidak mendukung salah satu dari pihak yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah satu dari pihak yang berkonflik agar mereka menuruti kata-kata saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mendamaikan masalah ini ya saya lakukan. Tugas saya sebagai Camat dan aparat pemerintah Di kecamatan sabbang ini memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan perkara ini agar tidak berkelanjutan. (wawancara Tanggal 20 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi pemerintah Kecamatan dalam menangani permasalahan ini netral tapi lemah dalam

menghadapi permasalahan ini karena dari pihak Pemerintah tidak pernah ingin mencari tau apa permasalahan yang sebenarnya dan kronologi dari permasalahan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kedua desa yang berkonflik dibantu oleh tokoh masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara adat seperti melakukan pemotongan kerbau.

Seperti Yang diungkapkan Oleh Kepala Dusun Soreang dengan Dusun Lempong.

“Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda dengan pemotongan kerbau di tempat kejadian dimana tempat mereka berkelahi”. (JP. Wawancara Tanggal 17 Oktober 2017).

“Setiap kita adakan perdamaian, kita potongkan kerbau, sebagai tanda bahwa pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong sudah berdamai”. (WK. wawancara Tanggal 16 Oktober 2014).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah kecamatan, pemerintah Desa dandang dan pemerintah Dusun Soreang beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, yang mana mampu meredah munculnya kembali konflik. Terbukti setelah beberapa kali mereka berdamai, akan tetapi mereka kembali berkonflik.

Seperti penuturan dari salah satu informan penulis, bahwasannya

“Pemerintah memang sudah melakukan perdamaian, akan tetapi pemerintah tidak benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Kalau

hanya sekedar pemotongan kerbau saja, itu hanya sebatas formalitas, toh buktinya konflik kembali terjadi”. (HY. Wawancara Tanggal 14 Oktober 2017)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan penulis lagi, bahwasannya :

“Kinerja pemerintah belum sepenuhnya sempurna, masa melakukan perdamaian akan tetapi pemuda yang berkonflik tidak dihadirkan, bagaimana ceritanya mau berdamai. Masa yang mau didamaikan itu orang-orang yang tidak berkonflik, kan aneh.”. (HJ. Wawancara 12 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti bahwa pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong masih saja terus berkonflik.

Secara umum ada tiga macam bentuk pengendalian bentuk konflik sosial

a. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai.

b. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”.

c. Arbitrasi

Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka

Upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kecamatan sabbang beserta pemerintah Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Yaitu, Melakukan Mediasi, Negosiasi, dan Memfasilitasi para pemuda yang terlibat konflik.

Hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan :

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Kita memediasi para pemuda pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah kedua desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman seperti sedia kala”. (JJ. wawancara Tanggal 20 Oktober 2017)

Hasil wawancara dengan pemerintah desa :

“kita memediasi para pemuda. Kita cari tau apa permasalahan yang sebenarnya. Kita memfasilitasi, dan kita melakukan negosiasi agar para pemuda bisa terbuka” (DP. Wawancara Tanggal 17 Januari 2017)

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perdamaian adalah kita memediasi para pemuda, di bantu dengan pemerintah Dusun Soreang dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”.(BN. Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017).

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah, pemerintah kecamatan Mappakasungguh beserta pemerintah Dusun Soreang dengan Dusun Lempong di bantu Oleh para Tokoh masyarakat beserta pihak Kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-

upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya sering berkonflik, kini sekarang sudah berangsur-angsur aman. Ini semua tak lepas dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang dikatan oleh beberapa informan yang penulis temui .

“Alhamdulillah sekarang daerah kami sdah mulai aman. Ini semua tak luput dari kerja keras para pemerintah dibantu dengan aparat kepolisian yang gigih untk menyelesaikan permasalahan ini.” (HY. Wawancara Tanggal 14 Oktober 2017)
“sekarang sudah aman, dibanding dengan yang dulu-dulu, keluar rumah saja kita takut, tapi karena pemerintah sudah cukup serius walaupun awalnya kita menganggap bahwa pemerintah tidak begitu serius menangani masalah ini, alhasil aman mi tawwa”. (AW. Wawancara Tanggal 14 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas, bahwasannya daerah yang dulunya dapat dikatakan sebagai daerah yang sering berkonflik, kini sudah mulai berangsur-angsur aman. Ini semua tak lepas dari peran pemerintah kecamatan, Pemerintah desa, tokoh asyarakat, serta kepolisian yang telah gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawanara tentang peranan pemnerintah keamnatan dan pemnerintah desa dalamn mnengatasi konflik.

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yag bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai negosiator, mediator dan fasilitator.

Peran pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Mediasi

Peranan pemerintah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyakbanyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius.

“Kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah di bantu dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian.” (JJ wawancara tanggal 17 Januari 2017)

Dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar kelompok pemuda dari Dusun Soreang dengan Dusun Lempong. penulis fikir, ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan oleh npemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Peran Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa dalam Melakukan Fasilitasi peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas),menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator). Campur tangan pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok pemuda ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upayah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah dari kedua desa yang bertikai memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten beserta kepolisian untuk melakukan pertemuan dengan pelaku konflik.

“Pemerintah dari desa Dusun Soreang dengan Dusun Lempong memfasilitasi kami dalam hal melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan para pelaku konflik, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda .

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah desa Buangin dan desa Dandang memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah desa demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Negosiasi Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari

masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan. Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses Negosiasi Lobbying tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai Skesepakatan dalam Negosiasi ternyata loby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik. Menurut JJ

“ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada para pemuda pelaku konflik”. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa Melakukan negosiasi apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang di ambil oleh pemerintah .

Peran pihak Kepolisian dalam Mengatasi Konflik yang terjadi antar Kelompok pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat

yang mengganggu ketertiban umum. Dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat. UU ini juga lebih mengedepankan penanganan konflik bukan hanya melalui pendekatan keamanan namun lebih jauh melalui pendekatan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh kepentingan yang dimulai dari tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

“Kami dari pihak kepolisian, dibantu oleh brimob turun langsung ke tempat kejadian perkara. Kami berusaha untuk menjadi penengah didalam konflik tersebut. Kami tidak membandingkan di antara kedua kelompok, kami memberi tembakan peringatan, akan tetapi masih saja mereka terus berkelahi. Kami memiliki tanggung jawab dalam hal ini sebagai pihak keamanan, kami akan berusaha sekuat tenaga agar perkelahian tersebut segera terselesaikan, apapun itu caranya kami dari pihak kepolisian akan siap. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.” (AJ.Wawancara Taggal 22 Oktober 2017)

Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pada tahap penghentian melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Sementara pada tahap pasca konflik melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, dengan mendasarkan kepada UU No 7 Tahun 2012 Presiden RI mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013.

Sejatinya Inpres itu bermaksud untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu, terpadu antar dan instansi terkait. Frekuensi

Terjadinya Konflik

Sumber : Wawancara DP, Selasa 11 Maret 2017 Keterangan :

Tahun 2008 : Konflik terjadi sejumlah 2 kali

Tahun 2009 : Konflik terjadi sejumlah 4 kali

Tahun 2010 : Konflik terjadi sejumlah 4 kali

Tahun 2011 : konflik terjadi sejumlah 2 kali

Tahun 2012 : Konflik terjadi sejumlah 1 kali

Tahun 2013 : Konflik tidak terjadi

Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa frekuensi terjadinya konflik antara pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong dari tahun 2008 sampai pada tahun 2013 terjadi peningkatan dan penurunan terjadinya konflik. Pada Tahun 2008 konflik terjadi sekitar 2 kali, kemudian pada tahun 2009 terjadi peningkatan hingga 4 kali terjadinya konflik, kemudian pada tahun 2010 konflik masi terus terjadi hingga 4 kali, pada tahun 2011 terjadi penurunan, konflik terjadi sekitar 2 kali, kemudian pada tahun 2012 kembali terjadi penurunan, konflik terjadi sekitar 1 kali, kemudian pada tahun 2013 kembali terjadi penurunan hingga konflik tidak terjadi. Artinya pada tahun 2008 sampai tahun 2010 penanganan konflik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dapat dikatakan gagal, kemudian pada tahun 2011-2013 terjadi penurunan terjadinya konflik, artinya pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa berhasil menyelesaikan konflik tersebut secara sedikit demi sedikit. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun Lempong, HY pada hari selasa 11 Oktober 2017.

“Konflik yang terjadi antara pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong sudah sangat lama, dan kemudian penanganannya pun juga berfariatif. Kita lihat saja konflik yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2013. Pada tahun 2008 sampai 2010 merupakan puncak terjadinya konflik, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2008 sampai 2010 konflik terjadi mencapai 100%, kemudian pada tahun 2011 sampai 2013 terjadi penurunan hingga mencapai 70%”.

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara Desa Buangin dan Desa Dandang dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami penurunan. Artinya penanganan konflik oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dari tahun 2008 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sehingga pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam hal penanganan konflik yang terjadi antara pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong.

Menurut Pemerintah Kecamatan.

“Kendala awalnya yaitu adanya ketakutan para pemuda didaerah konflik untuk bertemu dengan pemerintah kecamatan dan pihak keamanan. Karena seolah-olah mereka merasa bukan bagian dari pemerintah, dan pemerintah juga bukan bagian dari mereka”. (JJ. Wawancara Tanggal 20 Oktober 2014).

Dari Wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah kurang melakukan pendekatan dengan para pemuda, sehingga pemuda merasa bukan bagian dari pemerintah. Karena anggapan banyak orang bahwa pemuda di sekitar Dusun Soreang dengan Dusun Lempong itu nakal. kemudian dari anggapan itulah sehingga para pemuda setempat kurang disentuh oleh pemerintah.

“permasalahan yang besar yang kita hadapi saat ini yaitu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Seandainya kesadaran itu ada pada masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda, yakin bahwa hal seperti ini tidak bakalan terjadi. Kita akan hidup tentram, damai. Tidak ada perkelahian dimana-mana”.

Dari wawancara diatas, sudah jelas bahwa, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya para pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut, sehingga perkelhian serin kali terjadi

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk konflik kelompok masyarakat di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong.

Awal mula terjadinya konflik antar kelompok Pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Itu berawal sekitar tahun 1990 sampai Tahun 2014. Akan tetapi awal mula penyebab terjadinya konflik tersebut kurang jelas. Hanya sebatas kenakalan remaja, sehingga perkelahian tak terindahkan. Hanya karena dipengaruhi oleh minuman keras, hingga dendam sehingga kerap terjadi perkelahian antar pemuda yang berujung terjadinya konflik. Hal ini sterjadi karena adanya kesenjangan antara pemuda di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, yang mana dipiju oleh Dendam lama yang berkelanjutan tanpa ada tahap-tahap penyelesaiannya sehingga mengakibatkan masalah tersebut semakin berkelanjutan. Konflik yang terjadi antara Dusun Soreang dengan Dusun Lempong adalah konflik antar pemuda , karena konflik tersebut menjadi besar sehingga melibatkan para orang tua di Desa tersebut. Awalnya orang tua tidak ada yang ikut tapi karena konfliknya sudah besar akhirnya para orang tua pun ikut. Konflik ini juga terjadi karena orang tua tidak pernah memberitauhkan kepada anak-anaknya bahwa masyarakat di Dusun Soreang maupun Dusun Lempoang itu masih banyak yang memiliki hubungan keluarga, karena dulunya Dusun Soreang adalah bagian dari Dusun Lempong.

Yang menjadi puncak terjadinya konflik adalah akhir tahun 2010 dimana konflik kembali terjadi antara dusun tersebut. Yang mana terdapat berbagai korban yang terkena senjata tajam meskipun tidak ada korban jiwa pada konflik tersebut, akan tetapi dari konflik yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai macam kerugian bagi masyarakat sipil. Secara umum sumber atau penyebab terjadinya konflik yaitu :

Konflik Nilai. Kebanyakan konflik yang terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Katakan nilai itu sesuatu yang prinsip, dan prinsip itu tidak boleh dilanggar. Konflik terjadi, karena dua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa yang menjadi objek konflik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah konflik yang bersumber dari perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideology atas apa yang diperebutkan. Kurangnya komunikasi. Jangan menganggap sepele komunikasi antar manusia, karena konflik bisa terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka (fungsi komunikasi, antara lain adalah mengurangi tingkat ketidak pastian) dapat mengakibatkan konflik. Keadaan ini mendorong dua pihak menjadi cemas, mungkin pula takut sehingga mulai bertanya : dia atau saya yang harus lebih dahulu berkomunikasi. Yang masuk dalam kategori ini adalah konflik makna informasi. Artinya, dua pihak atau lebih member makna yang berbeda secara

diametral atas suatu informasi tentang apa yang menjadi sasaran konflik. Kepemimpinan yang kurang efektif/pengambilan keputusan yang tidak adil. Jenis konflik ini sering terjadi pada organisasi atau kehidupan bersama dalam sebuah komunitas dan masyarakat. Ketidakcocokan Peran. Konflik ini bisa terjadi dimana dan kapan saja, asal dalam sebuah organisasi (sosial maupun formal).

2. Penyebab terjadinya konflik kelompok sosial Dusun Soreang dengan Dusun Lempong

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antara kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi .0+antara warga, khususnya anak muda yang mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Kemudian dijelaskan oleh beberapa sosiolog mengenai akar penyebab konflik secara lebih luas dan terperinci. Mereka berpendapat bahwa beberapa hal yang lebih mempertegas akar dari timbulnya konflik diantaranya :

- a. Perbedaan antar-individu: di antaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

- b. Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi ataupun politik. Benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh makin bebasnya berusaha, sehingga banyak diantara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya. Adapun benturan kepentingan politik lihat lagi konflik kepentingan.
- c. Perubahan sosial, yang terjadi secara mendadak biasanya menimbulkan kerawanan konflik. Konflik dipicu oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak biasanya diwarnai oleh gejala dimana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Keadaan demikian ini, memicu banyak orang bertingkah yang berakibat pada benturan antar kepentingan baik secara individual maupun kelompok.
- d. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan in group dan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik, ideal, beradab di antara kelompok lain. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Bab 2

Pasal 5 Konflik dapat bersumber dari:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

2. Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Adapun penganut teori konflik menjabarkan bahwa penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan atau ketimpangan hubungan dalam masyarakat yang memunculkan diferensiasi kepentingan. Menurut Turner ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, di antaranya :

1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya yang sangat terbatas didalam masyarakat.
 2. Ditariknya lagi legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah.
 3. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan.
 4. Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah serta lambatnya mobilitas kelas atas.
 5. Melemahnya kekuasaan Negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah oleh elite.
 6. Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideology radikal.
3. Upaya Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 BAB III Psal 6

Mengenai Pencegahan Konflik dilakukan dengan Upaya :

- a. Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 3. Meredam potensi Konflik; dan
 4. Membangun sistem peringatan dini.
 - b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
4. Peranan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Antar kelompok

Dalam meredam dan menyelesaikan gejala yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai negosiator, mediator dan fasilitator.

- a. Peran pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Mediasi Peranan pemerintah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyakbanyaknya dari masing-masing

pihak yang berkonflik dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius.

- b. Peran Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa dalam Melakukan Fasilitasi peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas),menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator). Campur tangan pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok pemuda ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upayah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah dari kedua desa yang bertikai memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun

dari pemerintah kabupaten beserta kepolisian untuk melakukan pertemuan dengan pelaku konflik.

- c. Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Negosiasi Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan. Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses Negosiasi Lobbying tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata lobby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik
- d. Peran pihak Kepolisian dalam Mengatasi Konflik yang terjadi antar Kelompok pemuda Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam

kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat. UU ini juga lebih mengedepankan penanganan konflik bukan hanya melalui pendekatan keamanan namun lebih jauh melalui pendekatan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh kepentingan yang dimulai dari tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa.

1. salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di Dusun Soreang dengan Dusun Lempongn kurang aktifitas, karena kurangnya aktifitas para pemuda sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan melakukan kegiatan minum-minuman keras. Ini merupakan salah satu alasan sehingga kerap terjadi perkelahian antara pemuda sehingga dari perkelahian tersebut menjadi sebuah konflik yang besar. Dari semua informan yang didapatkan dilapangan menganggap bahwa kurangnya lapangan pekerjaanlah sehingga sering terjadi konflik.
2. Salah satu faktornya itu karena Masalah kesenjangan sosial yang mana hal tersebut melibatkan para tokoh yang ada di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong“Karena adanya kesenjangan sosial, maka terjadilah konflik antara Dusun Soreang dengan Dusun Lempong. Tidak adanya kecocokan peranan sehingga hal tersebut melibatkan para Tokoh yang ada di Dusun Soreang dengan Dusun Lempong, sehingga merambat ke pemuda.
3. Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Kita memediasi para pemuda pelaku konflik agar

permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah kedua desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman seperti sedia kala

B. Saran

Terkait mengenai resolusi konflik dari kejadian yang sedang berlangsung, maka penulis mengikutkan beberapa solusi dari penelusuran pustaka dan beberapa pengalaman resolusi konflik di beberapa tempat di Indonesia yang pertama yaitu :

1. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai.

2. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul

didalam konflik. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”.

3. Arbitrasi

Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka

Walaupun konflik telah berhasil diselesaikan ketika sebuah kejadian telah berlangsung, namun dalam analisa penulis konflik bermunculan dengan dipenuhinya beberapa faktor yang disebutkan pada BAB sebelumnya. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut kiranya diretas dengan solusi tanpa harus menyentuh langsung konflik yang sedang terjadi karena secara tidak langsung itu telah menyentuh persoalan mendasar dari konflik.

Konflik bisa diretas dengan menangani persoalan masalah lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Pemerintah mampu menangani masalah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak member peluang bagi generasi muda untuk berkarya..

DAFTAR PUSTAKA

- George Simmel Tahun 1903 *Teori-Konflik-Dalam-I-Pada-Dasarnya* Akses Online 13 Juni 2017. Dari: [Gajahmada2medan .Blogspot .Com /2013/11/Teori-Konflik-Dalam-I-Pada-Dasarnya.Html](http://Gajahmada2medan.Blogspot.Com/2013/11/Teori-Konflik-Dalam-I-Pada-Dasarnya.Html)
- Guba Dan Lincoln. 2013. *The Stages Of Group: A Retrospective Study Of Dynamic Team Processes*,
- Hendricks, William. 2006. *Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara
- Henruspito Oc, 1989 *Sosiologi Agama*. Akses Online 13 Juni 2017. Dari: <https://Asrikoe.Wordpress.Com/2011/12/01/Sosiologi-Agama-Drs-Hendro-Puspito-O-C/>
- James Dan Dean. 1980. *Pengertian Masyarakat Kelompok Dan Komunitas*. Akses Online 13 Juni 2017. Dari: / [https://Nuraeni.1094. Wordpress. Com/Pengertian-Masyarakat-Kelompok-Dan-Komunitas/](https://Nuraeni.1094.Wordpress.Com/Pengertian-Masyarakat-Kelompok-Dan-Komunitas/)
- Johan Galtung. 2013. *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik*. Akses Online 13 Juni 2017. Dari: [Http://Lapatuju.Blogspot.Co.Id/2013/02/Kerangka-Teoritis-Penyelesaian-Konflik.Html](http://Lapatuju.Blogspot.Co.Id/2013/02/Kerangka-Teoritis-Penyelesaian-Konflik.Html)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Edisi Kedua.
- Kamus Sosiologi, 1985 *Kamus Sosiologiab Jadberurutanlengkap*.Akses Online 13 Juni 2017. Dari: [Blogspot .Com/.../Kamus-Sosiologi-Lengkap.Html](http://Blogspot.Com/.../Kamus-Sosiologi-Lengkap.Html)
- Lewis A. Coser. 1913 *Teori Konflik Menurut Lewis Coser*. Akses Online 13 Juni 2017. Dari: Ronikurosaky.Blogspot.Com/2014/05/Teori-Konflik-Menurut-Lewis-Coser.Html
- Max Weber. 1864. *Konflik Lingkungan Dan Sumber Daya*, Harian Kompas
- Merton Dalam Raho' 2010. *Pengertian Peranan*. Akses. Onlene 13 Juni 2017. Dari: Kaghoo.Blogspot.Com/2010/11/Pengertian-Peranan.Html
- levinson Dalam Soekanto (2009:213) Kaghoo.Blogspot.Com/2010/11/Pengertian-Peranan.Html
- Mitchell, 1981 *Pengertian-Konflik* . Akses Online Tanggal 15 Juni 2017. Dari: Sobatbaru.Blogspot.Com/2011/04/Pengertian-Konflik.Htm
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : Pt. Rineka Cinta

- Novri Susan 2009 Pengantar Sosiologi Konflik Edisi Revisi Pengarang: *Novri Susan*, M.A. Penerbit: Kencana.
- Poerwadarminta, W.L.T. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yogyakarta : Pt. Lingkar Pena
- Ralp Dahrendorf {1929 *Perilakuorganisasi.Terori Konflik*. Akses Online 13 Juni 2017. Dari: Com/Ralf-Dahrendorf-Teori-Konflik.Html
- Ratih Lestari, 1988. *Analisis Pengaruh Konflik Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Operator Pada Bagian Produksi Pt Candratex Sejati, Bandung*
- Ritzer Dengan Mengutip Berghe, 2012. *Teori Teori Sosiologi Dan Paradigma*. . Akses Online 13 Juni 2017. Dari: [Rmizzgodrezky .Blogspot.Com/2012/03/Teori-Teori-Sosiologi-Dan-Paradigma.Html](http://Rmizzgodrezky.Blogspot.Com/2012/03/Teori-Teori-Sosiologi-Dan-Paradigma.Html)
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuanberparadigma* Ganda. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sabian Utsman. 2007. *Dasar-Dasar-Sosiologi-Hukum-Makna*. Akses Online 13 Juni 2017. Dari: Sabian-Uzman.Blogspot.Com/2009/02/Dasar-Dasar-Sosiologi-Hukum-Makna.Html.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Selo Sumarjono, 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah : Tugas Pokok Dan Fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto. 1990:268. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri Tahun 2013
- Uu No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik
- Wirutomo 1981 *Sosiologi-Industri*. Akses Online 13 Juni 2017.. Dari: Blogspot.Com/2012/05/Daftar-Pustaka.Html

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Pedoman Wawancara

Fenomena Konflik Antar Kelompok Masyarakat Dusun Soreang dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar

1. Bagaimana pendapat anda tentang fenomena konflik yang ada Desa Soreang?
2. Apa pemicu terjadinya konflik di Desa Soreang?
3. Kelompok-kelompok yang berkonflik apakah ada dari luar desa Soreang?
4. Bagaimana respon pemerintah setempat melihat adanya konflik di Desa Soreang?
5. Apakah ada langkah yang di tempuh pemerintah untuk menanggulangi konflik tersebut?
6. Bagaimana dampak yang terjadi dari adanya konflik tersebut?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Bagaimana pendapat bapak tentang fenomena konflik yang ada di dDesa Soreang. ?

Jawab

Informan yang bernama Dg Se're {46 tahun} yang telah mengatakan bahwa

kurangnya lapangan pekerjaan di Takalar ini mie juga yang memicu terjadinya konflik karena berkurangnya aktifitas masyarakat sehingga mereka biasanya banyak mengonsumsi minuman keras yang bisa membuat mereka tidak sadar sehingga mereka biasaya mengganggu orang yang melintas di daerah tersebut”(wawancara 12 Oktober 2017).

2. Apa pemicu terjadinya konflik di Desa Soreang.?

Jawab

Informan bernama Bidolla s. {52 tahun} yang mengatakan bahwa salah satu pemicu terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan kerja yang ada di Kab. Takalar yang membuat masyarakat kurang aktifitas, yang mana pemuda-pemuda hanya bisa mengonsumsi minuman keras ”(wawancara, 13 Oktober 2017).

3. Apakah ada orang yang menjadi aktor fropokatoryang dalagi terjadinya konflik.?

Jawab

Informan bernama Dg. Rewa { 51 tahun }. Tidak adaji propokator didalam konflik ini memang sudah lama terjadi jari sikede-sikede nia masalahna pasti bentrok lagi tapi alhamdulillah sudah amanmi

4. Bagaimana yang terjadi dari adanya konflik tersebut ?

Jawab.

Informan bernama Ahmad { 24 tahun } **kalo berbicara masalah dampak itu auda jelas pasti ada dampaknya, dampak yang ditimbulkan hanya mengganggu masyarakat lainnya dan meresahka warga**

5. Apakah ada langkah yang di tempuh pemerintah untuk menanggulangi konflik tersebut..?

Jawab

Informan bernama Deda {42 tahun}**“pemerintah memediasi para pemuda. Kita cari tau apa permasalahan yang sebenarnya. Kita memfasilitasi, dan kita melakukan negosiasi agar para pemuda bisa terbuka” (Wawancara Tanggal 17 Oktober 2017) “Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perdamaian adalah kita memediasi para pemuda, di bantu dengan pemerintah Dusun Soreang dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”.(BN. Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017)**

INFORMAN PENELITIAN DI DESA SOREANG

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Dg. Se're	46 tahun	Kepala desa
2	Bidollah	52 tahun	Kepala dusun
3	Dg. Rewa	51 tahun	petani
4	Ahmad	24 tahun	wieaswasta
5	Deda	42 tahun	Staf desa
6	Kahar	28 tahun	wiraswasta

RIWAYAT HIDUP



Miswar s. panggilan Miswar lahir di Takalar pada tanggal 28 Mei 1995 dari pasangan suami istri Bapak Saharuddin dan Ibu Farida. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara peneliti sekarang bertempat tinggal di Soreang Desa Soreang Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar. Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri No 26 Soreang, SMP Negeri 2 Mappakasungguh, SMA Negeri 3 Takalar lulus tahun 2013, dan mulai tahun 2013 mengikuti program S1 Pendidikan Sosiologi UNISMUH Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar {UNISMUH}